

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 3 Oktober 2017, memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan (94%), 9 LHP kinerja (1%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%). Secara umum, hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkapkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun, dan terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kemudian dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah senilai Rp509,61 miliar (2%).

Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan Mitra Kerja Komisi V terdapat 13 (tiga belas) entitas yang dilakukan pemeriksaan, 7 (tujuh) entitas pemeriksaan atas Laporan Keuangan, 1 (satu) entitas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), dan 5 (lima) entitas atas Laporan Pinjaman Hutang Luar Negeri (LPHLN). Dari pemeriksaan atas Laporan Keuangan sebanyak 7 (tujuh) entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Kementerian Perhubungan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Suramadu; Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; dan Badan SAR Nasional.

Kementerian/Lembaga seluruh Mitra Komisi V memperoleh anggaran belanja sebesar Rp154.160.704.096.000,00 dengan nilai realisasi sebesar Rp125.077.257.194.973,00 (81,13%). Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperoleh sebesar Rp8.367.628.152.403,00.

Klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Mitra Komisi V yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp121.962,73juta; berpotensi kerugian negara sebesar Rp125.259,94juta; dan mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar 54.178,75juta.

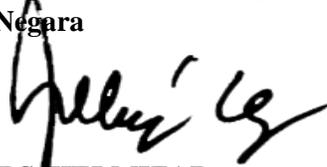
Dari pemeriksaan atas Laporan Pinjaman Hutang Luar Negeri (LPHLN) sebanyak 5 (lima) entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Loan ADB No. 2817-INO RRD; Loan ADB No.2654-INO MSMHP; Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI; Loan ADB No. 3122-INO NUSP-2; dan Loan IBRD No. 8043-ID WINRIP. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada LPHLN yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 5.976,23juta; berpotensi kerugian negara sebesar 1.421,53juta; dan mengakibatkan kekurangan penerimaan sebesar 8.931,08juta.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan bagi Komisi V untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Komisi V sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Oktober 2017

**Kepala Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan
Negara**



DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	i
2.	Daftar Isi.....	iv
3.	Telaahan Kementerian.....	1
3.1.	Kementerian Perhubungan	1
3.1.1	Gambaran Umum.....	1
3.1.2	Daftar Temuan.....	3
3.1.3	Sistem Pengendalian Intern.....	5
3.1.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	21
3.2.	PDTT Kementerian Perhubungan	29
3.2.1	Gambaran Umum.....	29
3.2.2	Daftar Temuan.....	31
3.3.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	49
3.3.1	Gambaran Umum.....	49
3.3.2	Daftar Temuan.....	51
3.3.3	Sistem Pengendalian Intern.....	53
3.3.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	79
3.4	Loan ADB No. 2817-INO RRDP	95
3.4.1	Gambaran Umum.....	95
3.4.2	Daftar Temuan.....	97
3.4.3	Sistem Pengendalian Intern.....	99
3.4.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	103
3.5	Loan ADB No. 2654-INO MSMHP	109
3.5.1	Gambaran Umum.....	109
3.5.2	Daftar Temuan.....	111
3.5.3	Sistem Pengendalian Intern.....	113
3.5.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	117
3.6	Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI	121
3.6.1	Gambaran Umum.....	121
3.6.2	Daftar Temuan.....	123
3.6.3	Sistem Pengendalian Intern.....	125
3.6.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	131
3.7	Loan ADB No. 3122-INO NUSP-2	137
3.7.1	Gambaran Umum.....	137
3.7.2	Daftar Temuan.....	139
3.7.3	Sistem Pengendalian Intern.....	141

3.8	Loan IBRD No. 8043-ID WINRIP	145
3.8.1	Gambaran Umum.....	145
3.8.2	Daftar Temuan.....	147
3.8.3	Sistem Pengendalian Intern.....	149
3.8.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	151
3.9	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	153
3.9.1	Gambaran Umum.....	153
3.9.2	Daftar Temuan.....	155
3.9.3	Sistem Pengendalian Intern.....	157
3.9.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	163
3.10	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	177
3.10.1	Gambaran Umum.....	177
3.10.2	Daftar Temuan.....	179
3.10.3	Sistem Pengendalian Intern.....	181
3.10.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	185
3.11	Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	193
3.11.1	Gambaran Umum.....	193
3.11.2	Daftar Temuan.....	195
3.11.3	Sistem Pengendalian Intern.....	197
3.11.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	201
3.12	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	213
3.12.1	Gambaran Umum.....	213
3.12.2	Daftar Temuan.....	215
3.12.3	Sistem Pengendalian Intern.....	217
3.12.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	225
3.13	Badan SAR Nasional	237
3.13.1	Gambaran Umum.....	237
3.13.2	Daftar Temuan.....	239
3.13.3	Sistem Pengendalian Intern.....	241
3.13.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	247

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perhubungan Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP-DPP

2015
WDP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 6.710.343.242.715
- **Anggaran Belanja**
Rp 43.151.241.937.000
- **Realisasi Belanja**
Rp 31.773.338.071.233 (73,63%)

NERACA

- **Aset**
Rp 203.933.270.130.422
- **Kewajiban**
Rp 593.730.709.571
- **Ekuitas**
Rp 203.339.539.420.851

Jumlah Temuan

Kepatuhan Perundang-undangan
8 Temuan



Sistem Pengendalian Intern
6 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

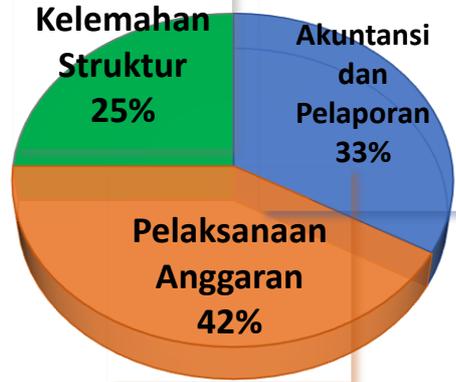
4
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

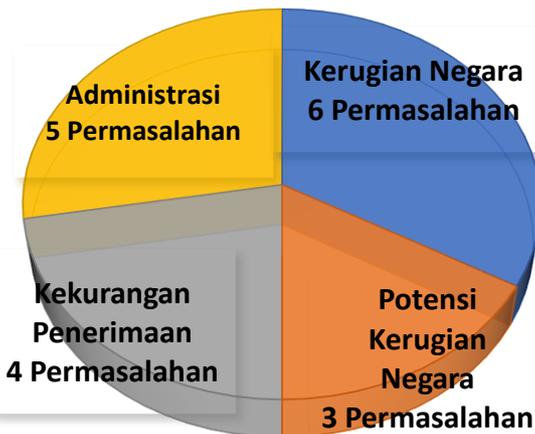
5
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

3
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

26.772,53
Juta

• Potensi Kerugian Negara

23.473,59
Juta

• Kekurangan Penerimaan

19.806,96
Juta

• Administrasi

5
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kemenhub Tahun 2016 :

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Pengelolaan PNBP Jasa Konsesi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum memadai
2	Penyajian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional Satker Direktorat Sarana Hubdat belum memadai
3	Pengendalian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhanan dan Kenavigasian pada Satker di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lemah
4	Penggangan belanja pada beberapa Satker di Lingkungan Kementerian Perhubungan belum sesuai ketentuan
5	Penatausahaan persediaan pada empat Satker di tiga Eselon I Kementerian Perhubungan belum memadai
6	Penatausahaan aset tetap pada enam Satker di empat Eselon I Kementerian Perhubungan belum memadai
Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan	
1	Pengelolaan PNBP pada tiga Satker Badan Layanan Umum (BLU) tidak memadai
2	Terdapat kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pada empat Eselon I
3	Terdapat potensi kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan pada empat Eselon I untuk pekerjaan yang belum dibayarkan 100%
4	Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak segera dipungut pada tiga Eselon I
5	Nilai aset tetap hasil pekerjaan pelapisan landa pacu, landas hubung dan <i>apron</i> volume 24,255m ² pada Satker Kantor UPBU Tardamu Sabu tidak diyakini kewajarannya
6	Pemanfaatan aset tanah oleh pihak ketiga pada Satker Kantor UPBU Budiarto Curug belum sesuai ketentuan
7	Penyajian aset tetap tanah pada tiga Satker di Ditjen Perhubungan Laut belum memadai
8	Aset peralatan dan mesin pada Satker Direktorat KPLP yang diperoleh dari hibah belum dilakukan registerasi dan pengesahannya pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

Temuan yang dibahas lebih lanjut adalah pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan atas Laporan Keuangan Kemenhub yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1, 2, 5, 6 dan temuan Kepatuhan nomor 2, 3

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS PENGELOLAAN ASET/BARANG MILIK NEGARA SAMPAI DENGAN SEMESTER 1 TAHUN 2016 PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Pemeriksaan bertujuan untuk menilai dan menyimpulkan apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi pengamanan, pemindahtanganan, penghapusan dan penatausahaan BMN pada Kementerian Perhubungan telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai serta Kepatuhan Pengelolaan BMN yang meliputi pengamanan, pemindahtanganan, penghapusan dan penatausahaan BMN pada Kementerian Perhubungan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

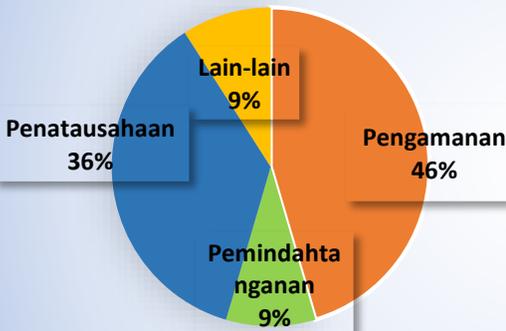
Kesimpulan:
Belum sepenuhnya efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Nilai Aset Tetap

- **Aset Tetap 2014**
Rp 155.704.623.514.500,00
- **Aset Tetap 2015**
Rp 178.581.759.717.628,00
- **Aset Tetap 2016**
Rp 182.009.051.819.461,00



Jumlah Temuan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK PDDT atas Pengelolaan BMN pada Kementerian perhubungan Tahun 2016:

No	Temuan
1	Aset tetap berupa peralatan dan mesin tidak diketahui keberadaannya senilai Rp12,92 miliar dan hilang belum ditindaklanjuti proses penyelesaiannya senilai Rp772,97 juta
2	Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor pada Satker Direktorat Bandar Udara senilai Rp4,32 miliar masih dikuasai oleh Mantan Pejabat, Mantan Pegawai dan Pegawai yang telah pensiun
3	Barang Milik Negara berupa tanah, kendaraan bermotor dan kapal belum didukung bukti kepemilikan
4	Pengamanan BMN berupa tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan belum tertib
5	Pencatatan Barang Milik Negara (BMN) dalam Laporan Barang Milik Negara secara gabungan/tidak berdasarkan satuan/volume
6	Pelaksanaan pemindahtanganan BMN pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara belum sesuai ketentuan
7	Penatausahaan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin serta jaringan irigasi belum sesuai ketentuan
8	Tanah atas nama pihak ketiga namun dicatat sebagai aset milik Kementerian Perhubungan
9	Aset tetap tanah sebanyak 48 bidang dan 74 unit kapal milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 25 Satker belum dapat ditelusuri pada Laporan BMN Semester I Tahun 2016
10	Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat belum diketahui persentasenya
11	Proses likuidasi Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tidak sesuai dengan ketentuan

Temuan yang dibahas lebih lanjut adalah beberapa temuan yang signifikan atas ketidakefektifan pengelolaan BMN sampai dengan semester I 2016 pada Kementerian Perhubungan yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan nomor 1, 2, 3, 4, 7 dan 11

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK PUPR dengan memperhatikan::

- Kesesuaian LK Kementan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP-DPP

2015
WDP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

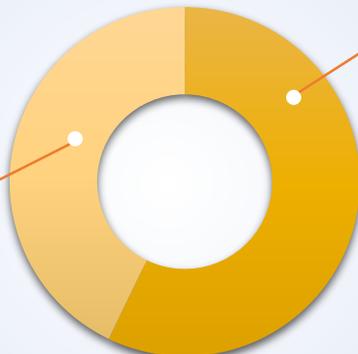
- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 1.459.783.844.641,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 98.191.487.770.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 83.262.649.477.503,00 (85%)

NERACA

- **Aset**
Rp 827.992.006.872.294,00
- **Kewajiban**
Rp 135.842.194.029,00
- **Ekuitas**
Rp 827.856.164.678.265,00

Jumlah Temuan

Kepatuhan Perundang-undangan
9 Temuan



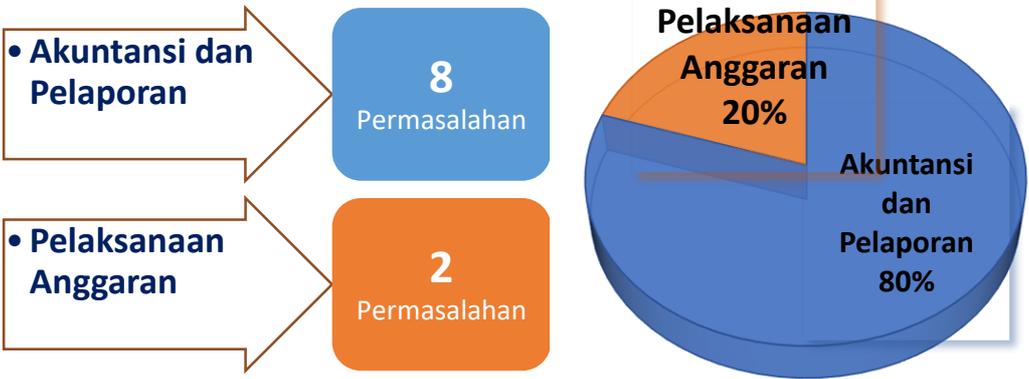
Sistem Pengendalian Intern

12 Temuan

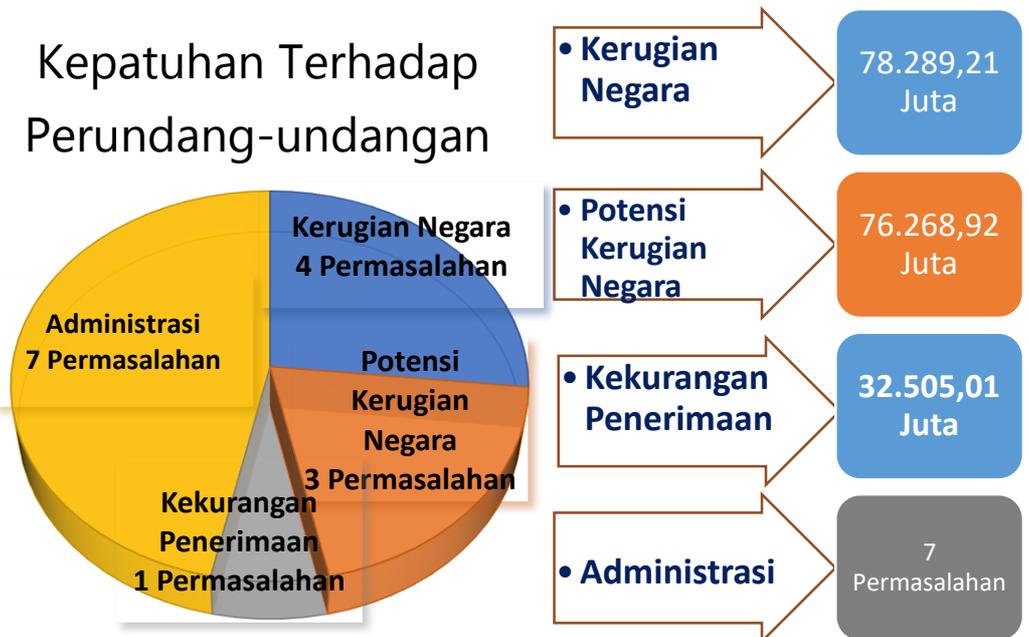


PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kementerian PUPR Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Pembayaran angsuran dan sisa piutang belum sepenuhnya ter-update dalam aplikasi
2	Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp64.163.697,00 bukan merupakan pendapatan Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya
3	Mekanisme penyetoran PNBP dilakukan secara tunai
4	Pengelolaan belanja Hibah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Cipta Karya belum tertib
5	Penatausahaan persediaan pada beberapa Satuan kerja belum tertib
6	Pencatatan aset tetap pada tiga satker dengan kuantitas 1 unit (m ²)
7	Aset tetap masih bernilai Rp1,00 pada Satker BBWS pompengan-jeneberang
8	Aset tetap pada enam satker dimanfaatkan pihak lain
9	Satker balai wilayah sungai Kalimantan II belum dapat menyajikan rincian aset tetap lainnya
10	Penghapusan aset tetap pada dua satker tidak tetap
11	Aset tetap yang digunakan/dikelola oleh pihak lain belum diproses hibah
12	Sistem aplikasi penyusutan dan penerapannya pada aset tetap renovasi belum tepat
Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan	
1	Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak belum tertib
2	Belanja barang pada lima satuan kerja dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp517.187.173,00
3	Pemborosan pada dua Satuan kerja sebesar Rp504.828.693,17
4	Kelebihan pembayaran belanja modal atas pekerjaan yang dilaksanakan kurang dari kontrak, pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan, tidak sesuai spesifikasi, penambahan volume pekerjaan dengan harga timpang dan kemahalan harga karena adanya prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan berpotensi lebih bayar sebesar Rp623,809.609,18 serta berindikasi lebih bayar sebesar Rp77.772.025.118,15

5	Potensi kelebihan pembayaran belanja modal TA 2016 atas pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (<i>Multi years</i>) yang tidak sesuai kondisi riil sebesar Rp16.181.530.013,13
6	Pelaksanaan pekerjaan belum sesuai ketentuan dan tidak dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dengan denda keterlambatan sebesar minimal Rp32.468.976.112,73
7	Potensi kelebihan pembayaran pembangunan rumah susun sewa tingkat tinggi pasar rumput sebesar Rp59.463.589.036,76 pada Satker Penyediaan Rumah Susun Strategis
8	Terdapat aset tetap berupa tanah senilai Rp3.394.037.873.306,00 belum bersertifikat dan kendaraan bermotor senilai Rp373.334.400,00 tidak didukung bukti kepemilikan yang sah
9	Pengadaan barang modal Puslitbang SDA belum sepenuhnya beroperasi dan belum beregister aset tetap

Temuan yang dibahas lebih lanjut adalah pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan atas Laporan Keuangan Kementerian PUPR yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1-12 dan temuan Kepatuhan nomor 1-8

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LOAN ADB NO-2817-INO REGIONAL ROADS DEVELOPMENT PROJECT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan RRDP bertujuan untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan Loan ADB No. 2817-INO per 31 Desember 2016 dengan memperhatikan: Kesesuaian LK Kementan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

- Penilaian atas sistem pengendalian intern dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku umum berkaitan dengan pengeluaran dan transaksi lainnya;
- Penilaian atas kecukupan bukti yang mendukung pelaksanaan prosedur pencairan dana;
- Penilaian atas kepatuhan pelaksanaan proyek dengan perjanjian pinjaman dan ketentuan yang ditetapkan oleh Loan Agreement



BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran



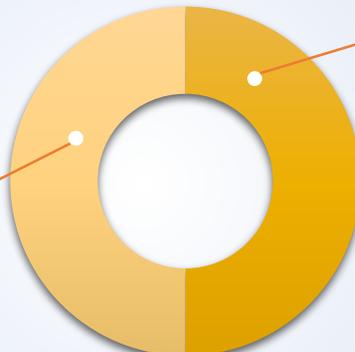
- **Belanja**
Rp 647.462.386.948 **(94,43%)**
- Komponen:**
- Civil Work**
Rp 605.958.258.248,00
- Consulting Services**
Rp 41.504.128.700,00

Jumlah Temuan

Kepatuhan Perundang-undangan
2 Temuan



Sistem Pengendalian Intern
2 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Kelemahan Struktur

3
Permasalahan

Kelemahan Struktur
100%

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

Kekurangan Penerimaan
1 Permasalahan

Potensi Kerugian Negara
1 Permasalahan

• Potensi Kerugian Negara

982,53
Juta

• Kekurangan Penerimaan

8.931,08
Juta

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Loan ADB No 2817-INO RRDP Tahun 2016

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	<i>Project Management Manual (PMM)</i> RRDP belum dimutakhirkan sesuai dengan perubahan SOTK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada paket-paket RRDP di satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Utara belum tertib
Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan	
1	Terdapat keterlambatan penyelesaian 2 (dua) paket pekerjaan RRDP di Kalimantan Utara belum dikenakan denda sebesar Rp8.931.084.381,00
2	Terdapat kekurangan volume pekerjaan dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada tiga paket pekerjaan fisik RRDP di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp982.537.611,28

Temuan yang dibahas lebih lanjut adalah pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan atas Laporan Keuangan Loan ADB No 2817-INO RRDP yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1, 2 dan temuan Kepatuhan nomor 1, 2

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LOAN ADB NO 2654-INO METROPOLITAN SANITATION MANAGEMENT AND HEALTH PROJECT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2016

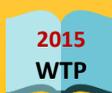


Pemeriksaan atas Laporan Keuangan MSMHP bertujuan untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan Loan ADB No. 2654-INO per 31 Desember 2016 dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



2014
WDPP



2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

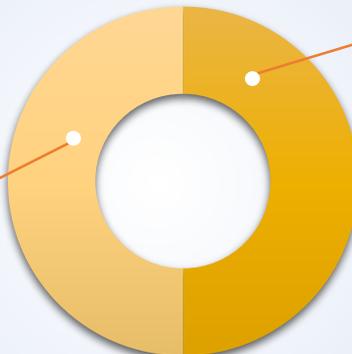


- **Belanja**
Rp 18.854.273.553 (65,58%)
- Komponen:**
Civil Work
Rp 14.507.622.240
Consulting Services
Rp 4.346.651.313

Jumlah Temuan

Sistem Pengendalian Intern
2 Temuan

Kepatuhan Perundang-undangan
2 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

1
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

1
Permasalahan

Pelaksanaan Anggaran
50%

Akuntansi dan Pelaporan
50%

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

Administrasi
1 Permasalahan

Kerugian Negara
1 Permasalahan

• Kerugian Negara

137,35
Juta

• Administrasi

1
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Loan ADB No 2654-INO MSMHP Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Laporan Keuangan MSMHP TA 2016 belum memberikan pengungkapan secara penuh dan akurat terhadap informasi kegiatan
2	Proses verifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban kegiatan <i>Project Implementation Support Consultants</i> kurang memadai
Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan	
1	Terdapat kelebihan pembayaran pada kegiatan <i>Project Implementation Support Consultants</i> senilai Rp107.655.700,00 dan USD2.233,67;
2	Bukti pertanggungjawaban <i>reimbursable expense</i> pada kegiatan <i>Project Implementation Support Consultants</i> tidak sesuai ketentuan senilai Rp113.911.700,00 dan USD4.144,9

Temuan yang dibahas lebih lanjut adalah pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan atas Laporan Keuangan Loan ADB No 2654-INO MSMHP yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1, 2 dan temuan Kepatuhan nomor 1, 2

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN LOAN WORLD BANK/IBRD NO.8121-ID
JAKARTA URGENT FLOOD MITIGATION PROJECT / JAKARTA EMERGENCY DREDGING INITIATIVE
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan JUFMP/JEDI bertujuan untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan Loan World Bank/IBRD No.8121-ID per 31 Desember 2016 dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WDP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

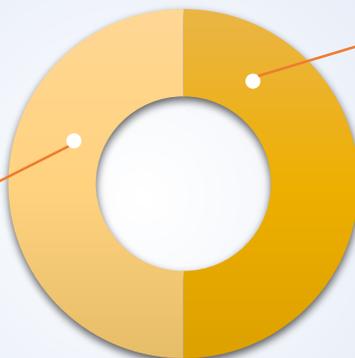
- Expenditures
Rp 1,366,733,321,698.00
- Civil Works
Rp. 1.319.642.171.517,00



Jumlah Temuan

Sistem Pengendalian Intern
2 Temuan

Kepatuhan Perundang-undangan
2 Temuan



PERMASALAHAN

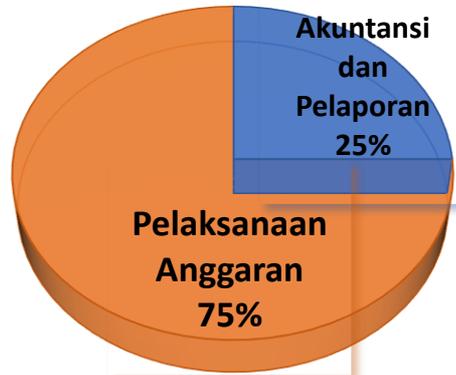
Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

1
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

3
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

5.076,30
Juta

• Potensi Kerugian Negara

439
Juta

• Administrasi

1
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Loan World Bank/IBRD No. 8121-ID JUFMP/JEDI Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Laporan Keuangan JUFMP/JEDI Tahun 2016 yang disajikan dalam bentuk interim financial report belum memadai
2	Pelaksanaan perjanjian belum optimal, terdapat kegiatan, laporan dan dokumen yang tidak dilaksanakan, diantaranya kegiatan FMIS dan laporan proyek
Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan	
1	Pelaksanaan pekerjaan <i>Dredging and Embankment of Tanjungan Drain and Lower Angke (Package 5)</i> belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp5.076.309.083,06
2	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban <i>Construction Supervising Consultant</i> tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.072.266.666,67

Temuan yang dibahas lebih lanjut adalah pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan atas Laporan Keuangan JUFMP/JEDI yang di temukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1, 2 dan temuan Kepatuhan nomor 1, 2

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN ADB LOAN 3122-INO NEIGHBORHOOD UPGRADING AND SHELTER PROJECT PHASE 2 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan *Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2* (NUSP-2) bertujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran Laporan Keuangan NUSP-2 Tahun 2016, dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan NUSP-2, termasuk ketentuan dalam kontrak dan loan agreement;
- Kerangka sistem pengendalian intern yang efektif.



BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

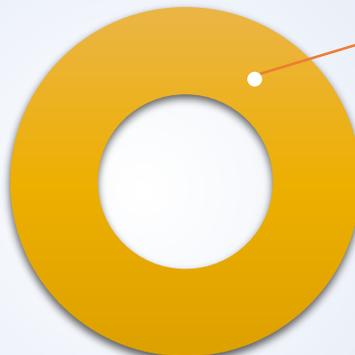
Laporan Realisasi Anggaran



- LRA Kategori I (Civil Works)
Realisasi
Rp 335.164.025.589
- LRA Kategori II (Training and Workshop)
Realisasi
Rp 5.488.243.501
- LRA Kategori III (Consulting Services)
Realisasi
Rp 35.748.311.375

Jumlah Temuan

Kepatuhan Perundang-undangan
0 Temuan



Sistem Pengendalian Intern
3 Temuan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK ADB Loan 3122-INO NUSP-2 Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Aset Tetap <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2</i> yang dimanfaatkan oleh pihak lain belum dilaksanakan diproses hibah
2	Pelaksanaan anggaran kegiatan kategori 1 (<i>Civil Works</i>) skala lingkungan dan skala kawasan belum sepenuhnya tercapai
3	Pelaksanaan kegiatan <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2</i> belum optimal

Temuan yang dibahas lebih lanjut adalah pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan atas Laporan Keuangan ADB Loan 3122-INO NUSP-2 yang di temukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1 dan 2

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN LOAN NO. 8043-ID WESTERN INDONESIA NATIONAL ROADS IMPROVEMENT PROJECT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan WINRIP bertujuan untuk memberikan opini atas Laporan Keuangan Loan World Bank/IBRD No.8043-ID per 31 Desember 2016 dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

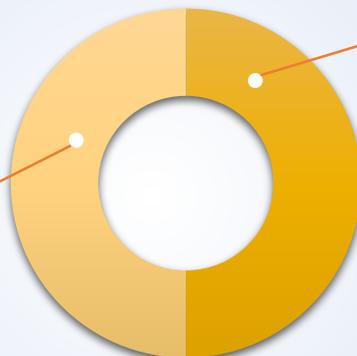
Laporan Realisasi Anggaran

- **Penggunaan Dana**
Rp 3.177.604.500.755,00
- **Realisasi Penggunaan Dana**
Rp 1.737.439.891.382



Jumlah Temuan

Kepatuhan Perundang-undangan
1 Temuan



Sistem Pengendalian Intern
1 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Kelemahan Struktur

1
Permasalahan

Kelemahan Struktur
100%

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

Kerugian Negara
1 Permasalahan

• Kerugian Negara

762,58
Juta

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Loan No. 8043-ID WINRIP Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	<i>Executing Agency</i> belum memaksimalkan upaya terwujudnya jalan berkeselamatan pada beberapa paket pekerjaan fisik jalan
Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan	
1	Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp762.582.183,23 pada empat paket pekerjaan konstruksi

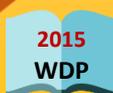
Temuan yang dibahas lebih lanjut adalah pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan atas Laporan Keuangan Loan No. 8043-ID WINRIP yang di temukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1 dan temuan Kepatuhan nomor 1

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 44.997.050.753,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 8.283.618.933.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 5.815.879.037.784,00 (70%)

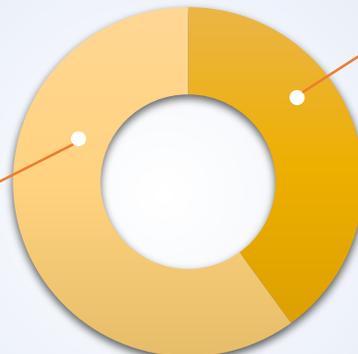
NERACA

- **Aset**
Rp 7.239.834.453.189,00
- **Kewajiban**
Rp 11.291.203.678,00
- **Ekuitas**
Rp 7.228.543.249.511,00

Jumlah Temuan

**Sistem Pengendalian Intern
5 Temuan**

**Kepatuhan Perundang-undangan
12 Temuan**



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

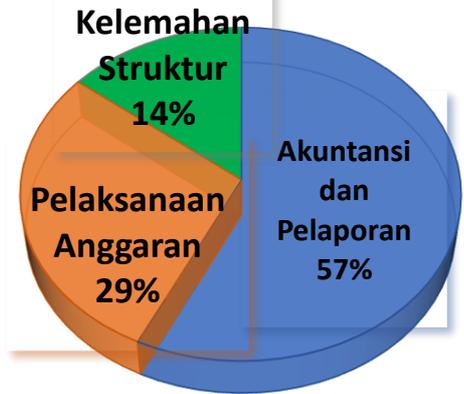
4
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

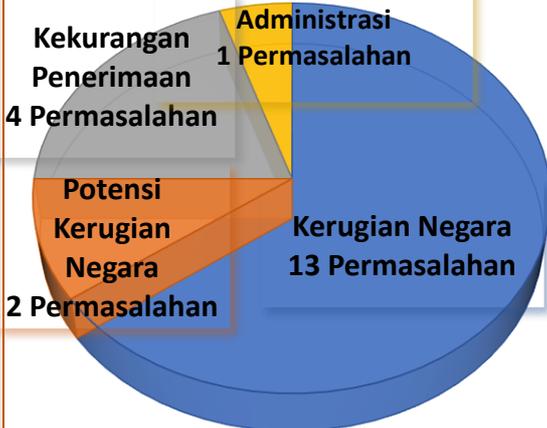
2
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

1
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

3.968,35
Juta

• Potensi Kerugian Negara

25.517,43
Juta

• Kekurangan Penerimaan

639,01
Juta

• Administrasi

1
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kemendes PDTT Tahun 2016

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Belanja barang dan jasa untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada direktorat sarana dan prasarana di daerah tertinggal tidak dilengkapi dokumen pembayaran sesuai ketentuan perundangan sebesar Rp31,33 Miliar
2	Terdapat persediaan sebesar Rp17,35 miliar belum dilakukan <i>stock opname</i>
3	Pengelolaan Aset Tetap Renovasi (ATR) Kemendesa PDTT belum sepenuhnya memadai
4	Terdapat KDP senilai Rp17,49 miliar yang belum dapat dimanfaatkan
5	Pengelolaan Aset lain-lain pada Kemendesa PDTT belum cukup memadai
Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan	
1	Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Satuan kerja Tugas Pembantu (TP) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (Ditjen PKP2Trans) di Provinsi Aceh sebesar Rp98,68 juta dan denda keterlambatan sebesar Rp4,57 juta
2	Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Satuan kerja Tugas Pembantuan (TP) Ditjen PKP2Trans di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp148,18 juta
3	Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Satuan kerja Tugas Pembantuan (TP) Ditjen PKP2Trans Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp147,82 juta
4	Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Satuan kerja Tugas Pembantuan (TP) Ditjen PKP2Trans di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp339,43 juta
5	Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Satuan kerja Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) sebesar Rp141,99 juta dan denda keterlambatan sebesar Rp150,76 juta
6	Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Satuan kerja Tugas Pembantuan (TP) Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp151,53 juta

7	Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Satuan kerja Tugas Pembantuan (TP) Ditjen Pengembangan Kawasan Transmirasi (PKTrans) di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp64,96 juta
8	Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Satuan kerja Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sebesar Rp739,07 juta, barang beda spesifikasi sebesar Rp383,15 juta dan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp18,95 juta
9	Kelebihan pembayaran atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai perjanjian/kontrak berupa bantuan pengembangan kakao paket satu, dua dan tiga pada Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp1,63 miliar
10	Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Satuan kerja Tugas Pembantuan (TP) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (Ditjen PKP2Trans) di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp101,11 juta
11	Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan pada Satuan kerja Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) sebesar Rp13,34 juta dan pemborosan atas alat pendukung sebesar Rp366,00 juta
12	Mekanisme pembayaran pekerjaan pada Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu) tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan terdapat denda yang belum dikenakan minimal sebesar Rp464,72 juta serta kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp2,12 juta

Temuan yang dibahas lebih lanjut adalah pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan atas Laporan Keuangan Kemendes PD TT yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1, 5 dan temuan Kepatuhan nomor 2, 3, 4, 8, 9

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan

- Kesesuaian LK Kementan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WDP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 138.448.599.038,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 1.426.001.074.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 1.368.383.199.052,00 (96%)

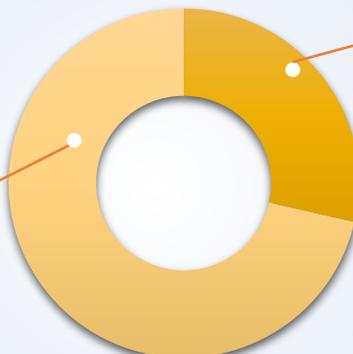
NERACA

- **Aset**
Rp 3.302.277.271.093,00
- **Kewajiban**
Rp 1.598.596.471,00
- **Ekuitas**
Rp 3.300.678.674.622,00

Jumlah Temuan

Kepatuhan Perundang-undangan
10 Temuan

Sistem Pengendalian Intern
4 Temuan



PERMASALAHAN

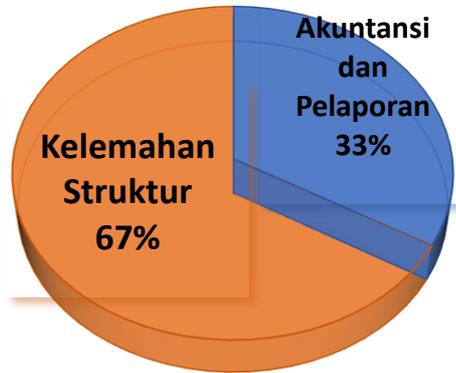
Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

1
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

2
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

• Kerugian Negara

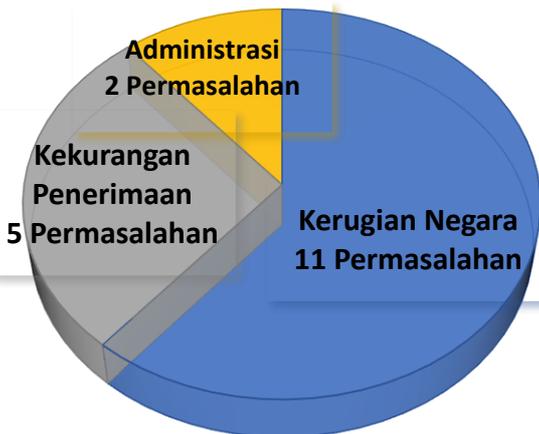
3.713,21
Juta

• Kekurangan Penerimaan

217,51
Juta

• Administrasi

2
Permasalahan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BMKG Tahun 2016

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Pencatatan dan pelaporan persediaan belum tertib
2	Rumah dinas pengganti sehubungan dengan pengembangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Stasiun Meteorologi Kelas I Ngurah Rai belum didukung Berita Acara Serah Terima
3	Proses penghapusan barang yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasional pada Satker Stage of Tuntungan berlarut-larut
4	Penatausahaan suku cadang yang diganti pada saat pemeliharaan belum memadai
Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan	
1	Pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Tidak Sesuai Ketentuan
2	Pekerjaan pemeliharaan jaringan <i>accelerograph non collocated intensity meter</i> dan <i>grounding</i> (termasuk sewa komunikasi) dilaksanakan tidak sesuai ketentuan
3	Pekerjaan pemeliharaan <i>AWOS Vaisala</i> dilaksanakan tidak sesuai ketentuan
4	Terdapat kelebihan pembayaran honorarium kelompok kerja Tahun 2016
5	Pekerjaan pemeliharaan radar cuaca EEC dilaksanakan tidak sesuai ketentuan
6	Pekerjaan pemeliharaan <i>AWOS All Weather</i> dilaksanakan tidak sesuai ketentuan
7	Pekerjaan pemeliharaan sistem monitoring gempa bumi Indonesia I dilaksanakan tidak sesuai ketentuan
8	Pekerjaan pemeliharaan <i>AWOS Coastal</i> dilaksanakan tidak sesuai ketentuan
9	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan <i>AWOS</i> kategori 2 (<i>AWOS Untuk Small Airport</i>) belum dikenakan denda
10	Pekerjaan pembangunan simple <i>AWOS</i> kurang dikenakan denda keterlambatan minimal sebesar Rp18,74 Juta

Temuan yang dibahas lebih lanjut adalah pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan atas Laporan Keuangan BMKG yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1, 4 dan temuan Kepatuhan nomor 1, 5, 9

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PELAKSANA — BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pelaksana – Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP – BPWS) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP-DPP

2015
WDP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 3.219.016.220,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 281.542.345.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 170.133.074.543,00 (60,43%)

NERACA

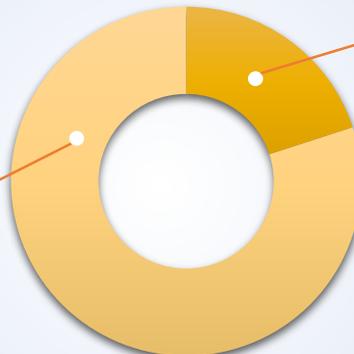
- **Aset**
Rp 675.832.747.194,00
- **Kewajiban**
Rp 0
- **Ekuitas**
Rp 675.832.747.194,00

Jumlah Temuan

Kepatuhan Perundang-undangan
8 Temuan



Sistem Pengendalian Intern
2 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

2
Permasalahan

Akuntansi dan Pelaporan
100%

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

Kekurangan Penerimaan
1 Permasalahan

Kerugian Negara
9 Permasalahan

• Kerugian Negara

2.532,73
Juta

• Kekurangan Penerimaan

29,76
Juta

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BP-BPWS Tahun 2016

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Pencatatan persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat belum sesuai yang sebenarnya sebesar Rp1.338.334.845,00
2	Penatausahaan aset BP BPWS belum tertib sebesar Rp158.133.440,00
Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan	
1	Tunjangan PNS yang dipekerjakan pada BP-BPWS tidak sesuai ketentuan sebesar Rp372.337.850,00
2	Kelebihan pembayaran honor output kegiatan sebesar Rp82.142.500,00
3	Kelebihan pembayaran pada pekerjaan sewa mesin fotocopy sebesar Rp48.000.000,00
4	Kelebihan pembayaran honor narasumber, moderator, dan uang harian rapat sebesar Rp29.036.000,00
5	Kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp14.036.700,00
6	Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan konstruksi sebesar Rp1.370.791.313,55 dan denda keterlambatan yang dipungut sebesar Rp29.761.534,00
7	Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan konstruksi sebesar Rp155.454.747,92
8	Kelebihan pembayaran BLP sebesar Rp89.500.000,00 dan BLNP sebesar Rp371.469.906,00

Temuan yang dibahas lebih lanjut adalah pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan atas Laporan Keuangan BP-BPWS yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1, 2 dan temuan Kepatuhan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan: Kesesuaian LK Kementan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP-DPP

2015
WDP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 7.216.166.339,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 458.299.665.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 428.176.115.050,00 (93,43%)

NERACA

- **Aset**
Rp 4.047.980.840.175,00
- **Kewajiban**
Rp 40.216.163,00,00
- **Ekuitas**
Rp 4.047.940.624.012,00

Jumlah Temuan

Sistem Pengendalian Intern

4 Temuan

Kepatuhan Perundang-undangan

5 Temuan

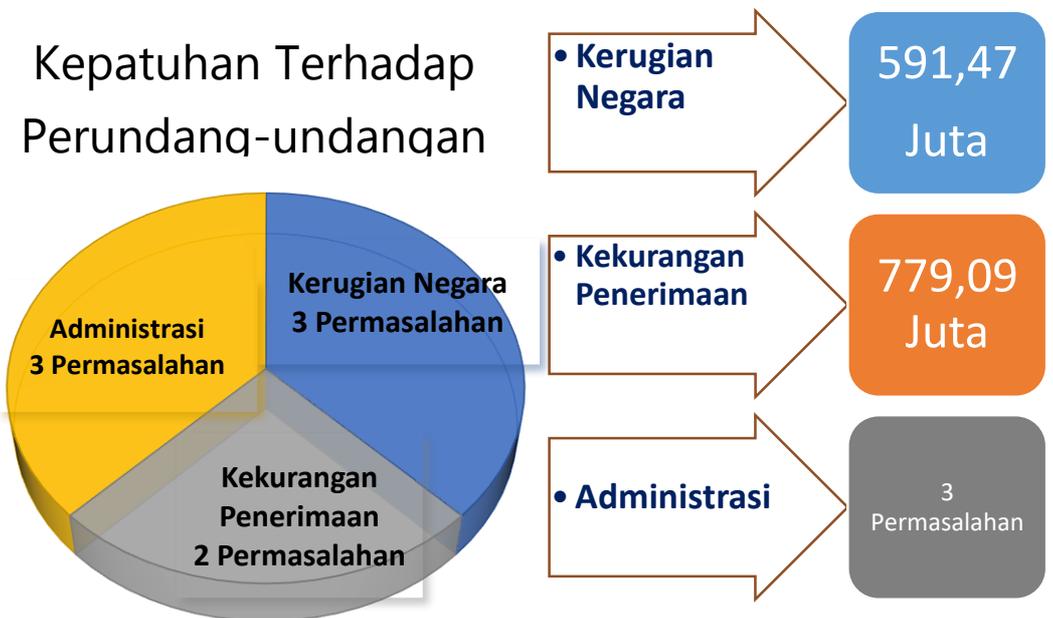


PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BPLS Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Penatausahaan persediaan pada BPLS Belum Tertib
2	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada BPLS tidak sesuai ketentuan
3	Pengelompokan jenis/objek belanja pada saat penganggaran tidak sesuai kegiatan yang dilakukan
4	Pertanggungjawaban belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dan belanja sewa tidak sesuai ketentuan
Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan	
1	PNBP atas bongkaran bangunan minimal senilai Rp1.346.866.600,00 belum disetor ke kas negara
2	Kekurangan penetapan denda keterlambatan atas dua paket pekerjaan senilai Rp101.467.281,00 dan denda keterlambatan yang belum dipungut senilai Rp504.391.656,00
3	Pertanggungjawaban pembelian Bahan Bakar Minyak untuk keperluan operasional dan belanja sewa kendaraan dinas tidak sesuai ketentuan
4	Perhitungan rincian harga item pekerjaan pengaliran lumpur ke kali porong Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan metode pelaksanaan senilai Rp2.398.837.760,97
5	Terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp536.276.116,92, kekurangan penetapan dan pencairan bank garansi senilai Rp173.247.558,00 pada realisasi belanja modal di tiga paket pekerjaan

Temuan yang dibahas lebih lanjut adalah pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan atas Laporan Keuangan BPLS yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1, 2, 3, 4 dan temuan Kepatuhan nomor 1, 2, 3, 4, 5

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN SAR NASIONAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Basarnas Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 3.620.232.697,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 2.368.512.372.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 2.258.698.219.808 (95,36%)

NERACA

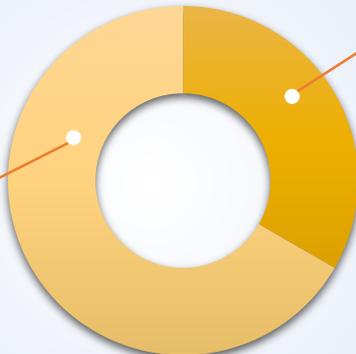
- **Aset**
Rp 4.974.327.647.013,00
- **Kewajiban**
Rp 4.900.898.631,00
- **Ekuitas**
Rp 4.969.426.748.382,00

Jumlah Temuan

Kepatuhan Perundang-undangan
6 Temuan



Sistem Pengendalian Intern
3 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

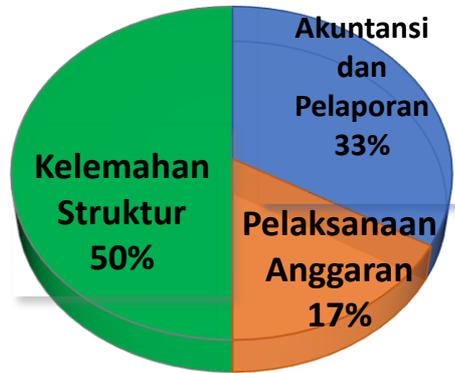
2
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

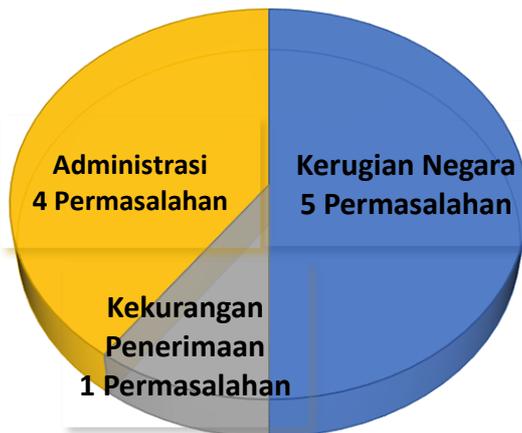
1
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

2
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

6.095,23
Juta

• Kekurangan Penerimaan

201,28
Juta

• Administrasi

4
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Badan SAR Nasional Tahun 2016

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Pembayaran kegiatan operasi pencarian dan pertolongan pada enam Kansar yang anggarannya dibebankan kepada DIPA kantor pusat tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1,91 miliar
2	Kantor SAR Yogyakarta belum melaksanakan tuntutan ganti rugi atas kehilangan Barang Milik Negara
3	Penerapan penyusutan pada sebagian aset tetap Basarnas kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya
Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan	
1	Pemungutan pajak oleh bendahara pengeluaran pada Kantor SAR Jakarta dan Kansar Surabaya yang berasal dari pembayaran uang persediaan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp217,86 juta
2	Pengadaan iklan layanan masyarakat pada biro umum Basarnas tidak didukung dengan data yang memadai
3	Pekerjaan pematangan dan pengurukan tanah belakang Kansar Bandung dilaksanakan tidak sesuai kontrak sebesar Rp61,76 juta
4	Pekerjaan pembangunan dua unit kapal penyelamatan (<i>rescue boat</i>) bahan aluminium panjang 40 M tidak sesuai ketentuan sebesar Rp126,60 juta
5	Aset tetap berupa tanah pada Kansar D.I.Yogyakarta tidak dikuasai baik secara fisik maupun hak kepemilikannya sebesar Rp6,15 miliar
6	Gedung dan bangunan pada 36 Satker sebagian belum memiliki izin mendirikan bangunan

Temuan yang dibahas lebih lanjut adalah pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan terhadap perundang-undangan atas Laporan Keuangan Basarnas yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1, 2, 3 dan temuan Kepatuhan nomor 1, 4, 5